

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Renstrada 2002-2007, periode 2005-2007 adalah tahap pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk mendukung stabilitas pembangunan nasional serta peningkatan kualitas SDM, penegakan supremasi hukum, peningkatan ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, fokus pembangunan pada tahun 2007 merupakan kelanjutan dari program pemantapan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2005 dan 2006.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 secara umum masih diarahkan pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas pembangunan sebagai berikut:

A. Prioritas Pimpinan Daerah

Prioritas Pimpinan Daerah bersifat *top down* dikenal dengan sebutan Program *Dedicated* merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Melihat urgensinya, dapat bersifat *multi-years* yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Di bidang fisik, terdapat pembangunan *flyover*, *underpass*, banjir kanal timur, transportasi massal dan sejenisnya. Di bidang sosial, terdapat perbaikan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya. Mekanisme pengalokasian anggaran untuk Program *Dedicated* menggunakan pendekatan

top-down, sehingga mengikat instansi wilayah maupun sektoral untuk melaksanakan program tersebut.

Terdapat 16 jenis program kegiatan yang dikategorikan ke dalam belanja program *dedicated*, dengan rincian :

- 1) **Banjir Kanal Timur**, berdasarkan pertimbangan bahwa kebutuhan biaya keseluruhan (2002-2007) adalah Rp 4,99 triliun, berupa pembebasan tanah yang harus ditanggung Pemprov sebesar Rp 2,47 triliun dan pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,52 triliun. Kebutuhan pembebasan tanah adalah 401,2 ha, diantaranya terdiri dari 101 ha lahan fasum yang merupakan kewajiban pengembang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembebasan lahan sampai dengan tahun 2005 direncanakan seluas 104,2 ha, sehingga sisa yang harus dibebaskan pada tahun 2006–2007 seluas 196 ha, diharapkan pembebasan tanah untuk BKT selesai pada tahun 2007.
- 2) **Normalisasi Sungai, Situ dan Saluran serta Waduk**, bertujuan untuk mewujudkan sungai dan situ yang tertata baik dan sehat serta mampu menjalankan fungsinya bagi lingkungan kehidupan kota. Pada tahun 2007 akan dilakukan penataan Situ Munjul, Situ Sunter Hulu, Situ Cilangkap, Situ Cimanggis dan Situ Rawa Lindung. Sungai yang akan ditangani antara lain Kali Angke, Ciliwung, Taman Sari, Cakung Lama, Sekretaris, Pesanggrahan, Mookervart dan Kali Banglio. Selanjutnya, akan dilakukan perbaikan turap Banjir Kanal Barat pada segmen Latumenten sampai Jembatan Tomang, dan segmen Pantai Indah Kapuk hingga Muara. Juga akan dilakukan lanjutan penyempurnaan Penataan Sistim Saluran di Kawasan Kebon Sirih dan Medan Merdeka Selatan. Sedangkan untuk kelengkapannya, akan dilakukan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan operasional Pintu Air dan Saringan Sampah. Untuk pembangunan waduk sebagai pengendali banjir direncanakan pembangunan Waduk Kapuk Poglar, Waduk Tomang dan Waduk Jelambar.
- 3) **Pelabuhan Laut Muara Angke**, direncanakan kegiatan lanjutan pengerukan alur laut kolam pelabuhan dan pematangan lahan, penyelesaian pembangunan dermaga, penyempurnaan Break Water, dan pembangunan fasilitas pelengkap pelabuhan.

- 4) **Busway**, bertujuan untuk menyediakan angkutan massal yang aman, nyaman dan terjangkau. Pada tahun 2003-2004 telah diselesaikan koridor 1 Busway (Blok M-Kota) dari rencana keseluruhan 13 koridor. Tahun 2005 telah diselesaikan koridor 2 (Pulo Gadung-Harmoni) dan koridor 3 (Harmoni-Kali Deres). Tahun 2006 sedang dibangun koridor 4 (Pulogadung-Dukuh Atas), koridor 5 (Kampung Melayu-Ancol), koridor 6 (Warung Jati/Ragunan-Imam Bonjol) dan koridor 7 (Kampung Rambutan-Kampung Melayu). Tahun 2007 direncanakan pembangunan koridor 8, 9, dan koridor 10. Kegiatannya meliputi pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), halte, separator, pool dan ticketing sistem, struktur jalan, simpang, penyusunan AMDAL, trase, penataan taman dan pohon, relokasi utilitas dan penataan lampu PJU, penertiban PKL dan penghuni liar, serta koordinasi penertiban di lima wilayah.
- 5) **Mass Rapid Transit (MRT)/Subway**, bertujuan untuk menyediakan angkutan massal yang cepat dan nyaman. Direncanakan akan dilanjutkan pembebasan tanah sekitar Terminal Lebak Bulus, Jl. TB Simatupang, Jl. RA. Kartini dan Jl. Fatmawati, serta penyempurnaan jalan alternatif pra-konstruksi.
- 6) **Flyover dan Underpass (FO/UP)**, bertujuan untuk mengurangi simpul kemacetan di perempatan sebidang dan tidak sebidang. Direncanakan penyelesaian pembangunan FO Martadinata, FO Roxi, FO Yos Sudarso, UP Kebayoran Lama dan UP Angkasa. Juga akan dilakukan pelebaran jembatan Latuharhary/Kuningan untuk mendukung Koridor 6 Busway (Ragunan-Kuningan).
- 7) **Perumahan**, bertujuan untuk menyediakan rumah susun bagi penduduk miskin yang tinggal di bantaran kali dan kolong jalan tol, buruh dengan penghasilan tetap, pekerja lepas dan karyawan berpenghasilan rendah, maka direncanakan akan dibangun sebanyak 2.000 unit dan fasilitas penunjangnya (jalan dan saluran), serta kegiatan perbaikan kampung di lima kawasan Kotamadya.
- 8) **Ijo Royo-royo**, bertujuan untuk mengembangkan hutan kota di setiap wilayah Kotamadya yang meliputi pembangunan taman kota, taman

interaktif dan menambah areal terbuka hijau (termasuk pembebasan tanah), serta penyelesaian Taman Persija Menteng.

- 9) **Waste-To-Energy (WTE)**, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah melalui pengadaan incenerator.
- 10) **PPMK**, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program Tribina (sosial, ekonomi, dan lingkungan).
- 11) **Peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan**, dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan beberapa kewenangannya ke tingkat Kelurahan yang meliputi kebersihan, ketertiban/keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- 12) **Peningkatan kualitas layanan publik Kecamatan**, dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui pendelegasian kewenangan dari Sudin Teknis Kotamadya/Kabupaten ke Pemerintahan Kecamatan di bidang PU Jalan, PU Tata Air, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan dan Penerangan Jalan Umum.
- 13) **Pendidikan**, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang meliputi rehab berat dan rehab total gedung SDN/SMPN, pembangunan gedung SMA baru dengan pertimbangan daya tampung SMA Negeri saat ini masih sangat terbatas, pembangunan SMA unggulan, dengan pertimbangan DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan sampai saat ini belum memiliki Sekolah Negeri yang mempunyai fasilitas lengkap seperti Gymnasium, kolam renang, gedung serbaguna dan lain-lain, pembangunan SMK Kelautan di Kepulauan Seribu, dengan pertimbangan bahwa potensi Kepulauan Seribu yang cukup besar di bidang kebaharian serta sebagian besar penduduknya merupakan nelayan.
- 14) **Kesehatan**, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama keluarga miskin melalui program Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin).
- 15) **Pilkada**, bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2007-2012.

- 16) Revitalisasi Kota Tua**, bertujuan untuk melestarikan sejarah kota Jakarta dan tempat tujuan wisata melalui peremajaan dan penataan kota tua.

B. Prioritas Wilayah

Program prioritas wilayah merupakan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian di enam wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki program prioritas yang beragam.

Program prioritas wilayah tersebut antara lain:

- 1. Wilayah Jakarta Pusat** meliputi penataan kawasan Senen dan Pasar Baru sebagai kawasan wisata belanja dan rekreasi serta program kota sehat di 35 RW kawasan kumuh.
- 2. Wilayah Jakarta Utara** meliputi pengembangan pantai publik Marunda.
- 3. Wilayah Jakarta Barat** meliputi revitalisasi kawasan Kota Tua, pengembangan hutan Kota Srengseng sebagai kawasan konservasi, dan pengembangan kawasan sentra primer baru barat.
- 4. Wilayah Jakarta Selatan** meliputi penataan kawasan Situ Babakan sebagai daerah resapan air, dan wisata.
- 5. Wilayah Jakarta Timur** meliputi penataan kawasan Segitiga Jatinegara dan program Kota Sehat di 3 Kelurahan.
- 6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu** meliputi pembangunan kabel bawah laut, *Sea Farming*, pengembangan *incenerator* di kawasan pemukiman serta penyediaan transportasi dari dan ke Kepulauan Seribu.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah di atas maka kebijakan prioritas pengalokasian APBD 2007 diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas pembangunan tersebut. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pembagian prioritas alokasi anggaran meliputi:

1. Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata, dan untuk kepentingan masyarakat luas (program *dedicated*).
2. Prioritas pengalokasian pada SKPD yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.
3. Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
4. Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja di tingkat wilayah (Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
5. Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.